





## C. Gambaran Umum

### 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, ditetapkan tugas Camat adalah :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Camat dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun kebijakan teknis operasional kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. menyelenggarakan pembinaan wilayah;
- d. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
- e. melaksanakan pelayanan publik;
- f. menyusun laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

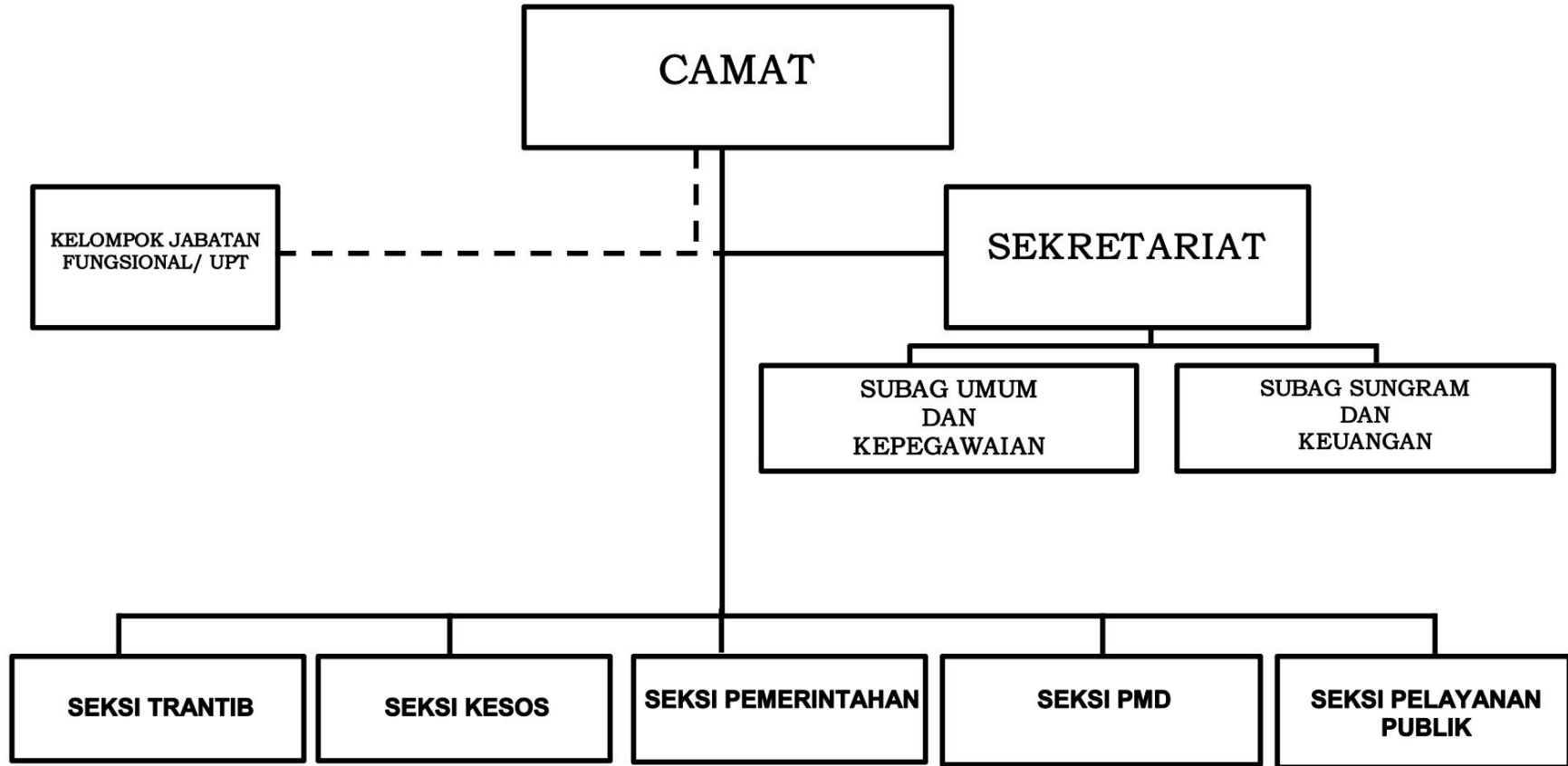
## 2. Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022, Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi meliputi :
  1. Seksi Pemerintahan;
  2. Seksi Pelayanan Publik;
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  5. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Kecamatan Wonodadi adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Kecamatan



Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonodadi didukung sumber daya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 13 orang. Adapun jabatan struktural di lingkungan Kecamatan Wonodadi sebanyak 9 jabatan terdiri dari eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 1 jabatan, eselon IV.a = 5 jabatan, eselon IV.b = 2 jabatan. Sedangkan jumlah ASN non eselon sebanyak 1 orang, tenaga harian lepas 3 orang.

Tabel 1.1  
Komposisi Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase
1	ASN	10 orang	76,92%
2	Tenaga Harian Lepas	3 orang	23,08%
Jumlah		13 orang	100%

Sumber: Data yang sudah diolah

#### D. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Wonodadi Tahun 2023 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar);
7. Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Wonodadi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
  - 1. Tugas Pokok dan Fungsi
  - 2. Struktur Organisasi
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika

### BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Stratejik
- B. Visi
- C. Misi
- D. Rencana Kinerja
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
  - 1. Definisi Operasional
  - 2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
  - 3. Perbandingan realisasi kinerja seta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
  - 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun Ini dengan target jangka menengah
  - 5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional
  - 6. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
  - 7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
  - 8. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja

B. Lain – lain yang dianggap perlu

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEJIK

Dalam sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, Kecamatan Wonodadi lebih dapat menyelaraskan visi dan misi Kabupaten Blitar dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Pada prinsipnya Perencanaan Strategik (Renstra) Kecamatan Wonodadi seharusnya mempunyai tolok ukur untuk menilai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/ staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi memaksimalkannya pelayanan baik internal maupun secara eksternal kepada masyarakat.

Renstra tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Kecamatan Wonodadi dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

Tabel 2.1  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik
		Jumlah Bumdes
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah
3	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pelanggaran trantibum di wilayah kecamatan
4	Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan sampai ke Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Wonodadi sesuai dengan Keputusan Camat Wonodadi Nomor adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (terhadap pelayanan Kecamatan)
2	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosentase peningkatan rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	$\frac{\sum \text{rekomendasi hasil koordinasi seluruh bidang yang ditindaklanjuti tahun } n \text{ dikurangi } \sum \text{rekomendasi hasil koordinasi seluruh bidang yang ditindaklanjuti tahun } n-1}{\sum \text{rekomendasi hasil koordinasi seluruh bidang tahun } n-1} \times 100 \%$
		Prosentase peningkatan desa/kelurahan dengan administrasi berkualitas baik.	$\frac{\sum \text{desa admin baik tahun } n \text{ dikurangi } \sum \text{desa admin baik tahun } n-1}{\sum \text{desa admin baik tahun } n-1} \times 100 \%$

Sumber: Data yang sudah diolah

## B. VISI

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipasif dan inovatif sehingga memiliki gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi. Visi yang sangat tepat bagi masa depan suatu instansi pemerintah akan mampu menjadi akselerator kegiatan instansi tersebut termasuk perancangan rencana strategis secara keseluruhan, pengeloaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran dan evaluasi kinerja yang akan di integrasikan oleh instansi tersebut.

Dalam kedudukannya sebagai unsur Pemerintah Kabupaten Blitar yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Wonodadi mendukung visi Pemerintah Kabupaten Blitar periode 2021-2026 sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baladun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)”**.

### C. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi memberi gambaran alasan yang menjelaskan jati diri sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar 2021-2026 diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

MISI 1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.”

Misi ke-1 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan kesejahteraan dan harmonisasi sosial yang diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintahan sebagai penyedia perlindungan dan penjaminan sosial kepada PPKS, masyarakat ikut terlibat dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, religius serta berbudaya di Kabupaten Blitar. Dengan harmonisasi sosial diharapkan masyarakat dapat saling menjaga satu sama lain dimulai dari lingkungan tetangga terdekatnya.

MISI 2 “Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.”

Misi ke-2 Kabupaten Blitar terfokus pada meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia adalah meningkatnya pembangunan manusia. Peningkatan pembangunan manusia tercapai melalui peningkatan kualitas dan akses pendidikan masyarakat, peningkatan kualitas dan akses kesehatan masyarakat, dan peningkatan pembangunan gender.

MISI 3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.”

Misi ke-3 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan (Profesional, Bersih, dan Tangguh) di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan adalah terciptanya Reformasi Birokrasi yang berkualitas. Reformasi Birokrasi yang berkualitas adalah melalui peningkatan inovasi layanan berbasis digital, peningkatan profesionalitas aparatur dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

MISI 4 Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.”

Misi ke-4 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blitar yang didukung oleh terciptanya kondusivitas daerah. Representasi tercapainya peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur adalah terciptanya penurunan kesenjangan ekonomi antar kelas, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur. terciptanya peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur adalah melalui peningkatan lapangan dan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan, peningkatan pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan daya saing pariwisata, peningkatan investasi daerah, peningkatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana.

Dalam hal ini kecamatan melaksanakan amanat Misi Ke-1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya dan Misi ke-3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas”.

#### D. Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (*quantitative objectives*) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Kecamatan Wonodadi menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Kecamatan Wonodadi. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahun 2023 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Wonodadi Tahun 2023. Target Kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan Kecamatan Wonodadi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Target sasaran untuk tahun 2023 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai pada tahun 2023.



Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Kecamatan Wonodadi Tahun 2023

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Desa	Persentase Desa Yang Memiliki Administrasi Baik	85%
		Jumlah BUMDES	11 Desa
2	Meningkatnya Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Sampai ke Desa	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	100 %
3.	Menurunnya Jumlah Pelanggaran Trantibum Diwilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum Diwilayah Kecamatan	100 %
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip	Nilai B

Sumber: Data yang sudah diolah

#### F. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas diwujudkan dalam 6 program dan 15 kegiatan dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 683.912.500,00. Empat Sasaran Strategis tersebut merupakan arahan bagi Kecamatan Wonodadi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program untuk mencapai indikator kinerja prosentase kepuasan aparatur dalam hal tersedianya dan peningkatan administrasi perkantoran yang meliputi ketatalaksanaan, ketatusahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan.

  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
  - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program untuk mencapai indikator kinerja jumlah fasilitasi yang dilaksanakan. Terdiri dari kegiatan:

  1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Terdiri dari kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Terdiri dari kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program dan kegiatan diatas mendapatkan alokasi per sasaran pembangunan dan akan lebih jelas dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5  
Alokasi Dana Tahun 2023

Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran ( Rp )
1	2	3	4
<b>Meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</b>		<b>Predikat SAKIP</b>	
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota</b>	<b>Rata/rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah Daerah</b>	<b>611.274.350</b>
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	915.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	21.062.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	70.460.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	113.045.350
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat sasaran	40.792.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan tepat waktu	14.244.950



Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
	Pemerintahan Desa	dilaksanakan	
<b>Menurunnya jumlah pelanggaran di Kecamatan</b>		<b>Prosentase penurunan pelanggaran Trantibum di Wilayah Kecamatan</b>	
	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan</b>	<b>10.920.000</b>
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	9.720.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkada yang dilaksanakan	1.200.000
	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Jumlah pembinaankerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan</b>	<b>20.712.400</b>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umm Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan	20.712.400

Sumber: Data yang sudah diolah

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Wonodadi merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Wonodadi Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, outputs dan outcomes. Menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

##### **1. Definisi Operasional dari setiap indikator kinerja**

- a. Sasaran strategis meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa serta pemberdayaan Desa

Sasaran strategis meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa dengan indikator Persentase terdapat ada kenaikan dari tahun 2022. Pada tahun 2023 ini Kecamatan Wonodadi memberikan reward kepada Desa Kunir sebagai Desa juara I dengan Kinerja Terbaik dengan nilai 8,5. Dengan skala penilaian 0 – 3 (kategori sangat kurang), 3 – 5 (kategori kurang), 5 – 6 (kategori cukup), 6 – 7 (kategori baik), 7 – 8 (kategori sangat baik), 8 – 9 (kategori memuaskan), 9 – 10 (kategori sangat memuaskan). Penilaian ini berdasarkan:

- 1) Kecepatan/ kepatuhan pemenuhan dokumen pencairan  
Obyek penilaiannya dari Siskeudes yaitu kecepatan pengajuan pencairan dilihat dari tanggal pengajuan SPP Desa per tribulan
- 2) Kelengkapan Dokumen Pencairan Anggaran dari kualitatif terhadap SPP Panjar dan SPP Definitif  
Obyek penilaiannya dari kuantitatif
- 3) Kebenaran/ Validitas Dokumen Pencairan Anggaran

Obyek penilaiannya dari hasil monev dan catatan pada lembar kendali pengawasan/ verifikasi berkas pengajuan pencairan

4) Prosentase Penyerapan APBDes

Obyek penilaiannya dari Siskeudes di label penyerapan anggaran

Untuk BUMDes indikator yang digunakan adalah kelengkapan administrasi yaitu kelengkapan AD/ ART, Berbadan Hukum

- b. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator predikat SAKIP perangkat daerah tidak terdapat perbedaan dengan tahun 2022, tapi untuk nilai SAKIP naik dari 62,33 menjadi 69,74. Nilai ini masuk dalam kategori baik yaitu terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Dengan rincian seperti berikut:

Tabel 3.1  
Hasil Evaluasi SAKIP 2023

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	27,86
2	Pengukuran Kinerja	30	25,00
3	Pelaporan Kinerja	15	5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11,88
	<b>Jumlah</b>	100	69,74

Sumber: Data yang sudah diolah

- c. Sasaran strategis Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator jumlah penurunan pelanggaran trantibum di wilayah kecamatan mencapai 100%. Untuk tahun 2023 sasaran strategis ini belum ada.
- d. Sasaran strategis meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan sampai ke Desa dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti mencapai 100% sama dengan tahun 2022.

2. Perbandingan Antara target dan realisasi kinerja

Pada tahun 2023 Kantor Kecamatan Wonodadi mempunyai 6 (Enam) program kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan. Hasil capaian kinerja masing - masing sasaran akan diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2  
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik	85%	72,72%	85,55%
		Jumlah BUMDES	11 Desa	10 Desa	90,90%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	B	B	100%
3.	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah penurunan pelanggaran trantibum di wilayah kecamatan	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan sampai ke Desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sumber: Data yang sudah diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada strategis 1 yaitu “Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa” sasaran menargetkan pencapaian kinerja **85%**. Dan pada tahun 2023 ini tercapai **85,55%**. Dari realisasi target ini capaian kinerja mencapai 100%. Dan dari 11 (sebelas) BUMDes terdapat 10 (sepuluh) BUMDes yang mempunyai administrasi lengkap.

Sasaran strategis 2 “Meningkatnya akuntabilitaskinerja Perangkat Daerah” menargetkan pencapaian **skore SAKIP SKPD dengan nilai B** dan tahun 2023 berhasil tercapai dengan skore 69,74. Angka ini terdapat pada interval nilai >60-70 dengan interpretasi SAKIP **B** sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Wonodadi Tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Pencapaian kinerja tahun 2023 sebesar 100%.

Sasaran strategis 3 yaitu “Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum “ pada tahun 2023 menargetkan persentase 100% dan berhasil tercapai dengan persentase 100%. Dari realisasi target ini capaian kinerja berhasil 100%.

Sedangkan sasaran strategis 4 indikator kinerja prosentase indeks kepuasan masyarakat dan persentase keluhan masyarakat terhadap

pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti menargetkan pencapaian kinerja sebanyak 100 % dan terealisasi 100%, dengan begitu Capaian kinerja mencapai 100%.





- d. Pada indikator Jumlah penurunan pelanggaran trantibum di wilayah kecamatan tidak ada perubahan dari tahun 2022 ke tahun 2023
4. Perbandingan antara realisasi dan target jangka menengah

Tabel 3.4  
Perbandingan antara realisasi dan target jangka menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi		Tingkat Kemajuan (%)
				2022	2023	
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Desa yang memiliki administrasi baik	100%	80%	72,72%	(7,28)
		Jumlah Bumdes	11 Buah	10 Buah	10 Buah	0
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	A	B	B	7,41
3	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah penurunan pelanggaran trantibum di wilayah kecamatan	100%	100%	100 %	0
4	Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan sampai ke Desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	0

Sumber: Data yang sudah diolah

Tabel di atas menggambarkan Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (Renstra) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Berbagai daya dan upaya telah dilakukan oleh semua Aparatur Kecamatan Wonodadi untuk melaksanakan semua indikator kinerja agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan kekurangan dan



sarana prasarana penunjang untuk mewujudkan kantor kecamatan yang representative, aman, nyaman, ramah anak, ramah lansia dan peduli terhadap perempuan. Misalnya ruang tunggu yang nyaman, *playground*, ruang laktasi, loket antrian, kantor dan lingkungannya yang bersih dan nyaman.

Sarana prasarana pendukung yang sangat dibutuhkan adalah kendaraan operasional. Kondisi yang ada kendaraan operasional di Kecamatan Wonodadi belum seimbang dengan jumlah Pejabat Struktural yang ada. Pemenuhan kebutuhan akan kendaraan operasional diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan di Kecamatan Wonodadi.

#### 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Kecamatan Wonodadi menggunakan perbandingan prosentase capaian kinerja dengan prosentase penyerapan anggaran. Penggunaan berbagai sumber daya telah dilakukan dengan melakukan efisiensi tanpa mengurangi jumlah tugas yang dilakukan. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik	88,225 %	99,53 %	(10,99%)
		Jumlah BUMDes			
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	100 %	91,77 %	8,23 %
3	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pelanggaran trantibum di wilayah kecamatan	100 %	98,15 %	1,40 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
4	Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan sampai ke Desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	96,52 %	3,48%
<b>Rata-rata</b>			<b>97,1 %</b>	<b>97,28 %</b>	<b>0,53 %</b>

Sumber: Data yang sudah diolah

Sasaran strategis Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa ada 2 program dan 2 kegiatan yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Rata-rata capaian realisasi anggaran program tersebut adalah 99,53 % sehingga tingkat efisiensi tercapai -10,99 %. Hal ini dikarenakan adanya realisasi anggaran lebih tinggi dari capaian kinerja sehingga tingkat efisiensi rendah.

Sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ada 1 program dan 7 kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran tercapai 91,77% sehingga tingkat efisiensi tercapai 8,23%.

Sasaran strategis Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan sampai ke Desa ada 1 Program dan 3 Kegiatan yaitu Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Realisasi anggaran tercapai 96,52% sehingga tingkat efisiensi tercapai 3,48%.

Sasaran strategis Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum ada 2 Program dan 3 Kegiatan yaitu Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan

kepala daerah, serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dimana realisasi anggaran tercapai 98,15% sehingga tingkat efisiensi tercapai 1,40%.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dari sasaran strategis yang ada, secara umum Program/Kegiatan yang telah dilakukan sudah menunjukkan keberhasilan. Alokasi kegiatan Program Utama dan Penunjang lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6  
Alokasi per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
<b>Program Utama</b>				
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik	57.058.250	2,58%
		Jumlah BUMDes		
2	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pelanggaran trantibum di wilayah kecamatan	31.632.400	1,43%
3	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	4.747.500	0,22%
<b>Program Penunjang</b>				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Score dan peringkat SAKIP SKPD	2.117.812.590	95,77%
	<b>JUMLAH</b>		<b>2.211.250.740</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data yang sudah diolah

Sedangkan perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran Tahun 2023 di Kecamatan Wonodadi sebagai berikut:



Tabel 3.8  
 Capaian per jenis belanja

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	1.527.338.240	1.368.480.347	158.857.893	89,60 %
2	Belanja Barang dan Jasa	643.120.000	626.643.042	16.476.958	97,44 %
3	Belanja Modal	40.792.500	40.792.500	-	100%
<b>Jumlah</b>		<b>2.211.250.740</b>	<b>2.035.915.889</b>	<b>175.334.851</b>	<b>92,07 %</b>

Sumber: Data yang sudah diolah

Tabel 3.9  
 Capaian per Program

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.117.812.990	1.943.562.589	174.250.001	91.77%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.747.500	4.582.500	165.000	96.52%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.115.000	9.115.000	-	100%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.920.000	10.560.000	360.0000	96,70%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	20.712.400	20.630.000	82.400	99.60%
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47.943.250	47.489.750	453.500	90,05%
<b>Jumlah</b>		<b>2.211.250.740</b>	<b>2.035.939.839</b>	<b>175.310.901</b>	<b>92,07%</b>

Sumber: Data yang sudah diolah



Akhirnya dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Wonodadi yang telah dibuat bersama-sama ini dapat menjadi tolak ukur, bahan pertimbangan dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Wonodadi, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu ***“terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan akhlak mulia baldatun, thoyibatun, warobun ghofur”***.

Wonodadi, Pebruari 2024

**CAMAT WONODADI**

**IMAM SAFII SH.MH**

Pembina Tk. I

NIP. 19700404 199703 1 008